

Fungsi Manajemen Pendidikan Inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto

JURNAL PENDIDIKAN KHUSUS

**FUNGSI MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SDN MENTIKAN 1
MOJOKERTO**

**Diajukan kepada Universitas Negeri Surabaya
untuk Memenuhi Persyaratan Penyelesaian
Program Sarjana Pendidikan Luar Biasa**



UNESA
Universitas Negeri Surabaya

Oleh
OURROTA A'YUN
NIM. 14010044072

Universitas Negeri Surabaya

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA
2018**

FUNGSI MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SDN MENTIKAN 1 MOJOKERTO

Qurrota A'yun dan Siti Mahmudah

(Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya)

qurrota.a.14@gmail.com, mahmudah_plb@yahoo.com

ABSTRACT

Inclusive education is an educational system which gives services to every student without any specific requirements. By the existence of inclusive education, each student can get proper education and services.

The purpose of this study is to describe the implementation of inclusive educational management at SDN Mentikan 1 Mojokerto. This study is a descriptive qualitative study. To collect the data, the researcher did interviews, observations, and documentations. In analyzing the data, the researcher used descriptive qualitative method: data condensation, data serving, making conclusion, and verifications.

The conclusion of this study shows four function of inclusive educational management: 1) Planning: making vision, mission, purpose of inclusive school, and school preparation for short and long term. Further, funding resources, modified KTSP and 2013 curriculum, syllabus, RPP, teachers, and also facilities. 2) Organizing: considering the human resources and also the activities, by making new students acceptance committee which includes students with special needs. Making school organization and its job list. Delegating teachers and students to participate in outside school. Managing students' placements based on the criteria. (3) Activating: implementing teaching-learning based on the lesson plan, using method, model, media, source of learning and also approach based on students' characteristics. Doing an opening and closing for the study time based on the rules. Giving directive, and command for the students to do the task based on the qualifications. Giving motivation and support to reach the objectives of the study. 4) Controlling: Performance supervision, educational department supervision, periodic evaluation. The obstacles are the lack of specific associate teachers and the facilities for students with special needs.

Keywords: *function of management, inclusive education, students with special needs*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara. Pendidikan berhak diberikan pada setiap anak yang berusia sekolah tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus. Salah satu layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif di suatu sekolah tentu terdapat adanya manajemen yang digunakan dalam pengaturan pelaksanaan pendidikan inklusif.

Manajemen merupakan kerjasama beberapa pihak untuk mencapai tujuan suatu organisasi yang telah dirumuskan. Manajemen dapat diartikan pula sebagai pengaturan, pelaksanaan, pengelolaan suatu organisasi guna mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Pengertian tersebut merupakan pengertian manajemen dalam hal umum. Adapun manajemen yang difokuskan dalam hal ini ialah manajemen pendidikan.

Menurut George R. Terry (1877-1955) (dalam Amtu, 2011: 56), manajemen ialah sebuah proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan; pemanfaatannya masing-masing dalam bingkai sebagai ilmu pengetahuan dan seni, serta diikuti secara berurutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen adalah suatu fungsi,

suatu disiplin, dan suatu tugas yang harus dilakukan, dan sebagai praktik disiplin manajer, dalam melaksanakan fungsi dan mengemban tugas.

Menurut Rivai dan Murni (2010:103) manajemen pendidikan sebagaimana manajemen secara umum, terdapat 4 hal pokok, yaitu perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidikan, penggiatan pendidikan, serta pengendalian atau pengawasan pendidikan.

Menurut Hariri (2016:56), manajemen pendidikan merupakan upaya strategis guna peningkatan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan merupakan bukan tugas yang ringan, karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, namun mencakup berbagai persoalan yang rumit sehingga pelaku pendidikan dituntut menguasai manajemen pendidikan yang lebih baik. Sayangnya, sejauh ini aspek manajemen pendidikan di berbagai tingkat satuan pendidikan belum dijadikan sebagai landasan pelaksanaan pendidikan yang serius, sehingga seluruh komponen sistem pendidikan yang kurang berfungsi dengan baik. Lemahnya penguasaan manajemen pendidikan oleh para pelaku pendidikan juga memberikan dampak terhadap tidak efisien internal pendidikan yang terlihat dari rendahnya mutu lulusan.

Berdasarkan pemaparan di atas, manajemen meliputi 4 hal pokok yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*),

dan pengawasan (*controlling*). Selanjutnya 4 hal pokok tersebut dapat dimasukkan dalam 4 hal pokok pada manajemen pendidikan.

Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus untuk dapat belajar bersama dengan anak reguler di sekolah reguler. Tujuan pendidikan inklusif ialah guna menyetarakan anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler tanpa perbedaan. Dengan adanya pendidikan inklusif, mampu menghapuskan pandangan negatif tentang anak berkebutuhan khusus.

Menurut Mudjito (2012:33) menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberi kesempatan pada seluruh peserta didik yang memiliki kelainan dan mempunyai potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik reguler lainnya. Artinya bahwa pendidikan inklusif merupakan pendidikan terpadu yang diharapkan dapat memfasilitasi pendidikan bagi semua, terutama anak-anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus yang selama ini masih banyak yang belum terpenuhi haknya untuk mendapat pendidikan seperti anak-anak normal lain.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Hal tersebut juga berlaku pada anak berkebutuhan khusus, yang juga berhak mendapatkan pendidikan, salah satunya dalam memperoleh pendidikan inklusif. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang di dalamnya terdapat hak penyandang disabilitas salah satunya ialah mendapat pendidikan.

Adapun dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, yang menyatakan bahwa menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Serta di setiap kabupaten/kota yang wajib menunjuk minimal 1 SD dan 1 SMP di satu kecamatan, serta 1 SMA/SMK. Salah satunya yakni di Mojokerto.

Kota Mojokerto merupakan salah satu daerah yang menaruh kepedulian dan perhatian tentang penyandang disabilitas. Terdapat pada Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun Pelajaran 2013/2014 dalam pasal 4 ayat (9) tentang sekolah penyelenggara inklusif. Beberapa sekolah telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Mojokerto sebagai sekolah inklusif. Salah satu

sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif adalah SDN Mentikan 1 Mojokerto.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di SDN Mentikan 1 Mojokerto, sekolah tersebut merupakan sekolah tingkat dasar pertama yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Mojokerto sebagai salah satu sekolah penyelenggara inklusif pada tahun 2013. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

SDN Mentikan 1 Mojokerto telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Mojokerto sebagai sekolah percontohan atau *piloting* pendidikan inklusif di Kota Mojokerto. Selain itu, SDN Mentikan 1 Mojokerto ditunjuk sebagai sekolah inklusif karena yang menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan pendidikan inklusif di Mojokerto. Serta tenaga pendidik di SDN Mentikan 1 Mojokerto telah mengikuti workshop tentang pendidikan inklusif. Hal tersebut menjadikan SDN Mentikan 1 Mojokerto bersedia menerima anak berkebutuhan khusus sebagai peserta didiknya.

Namun juga masih terdapat kekurangan dalam hal sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik yang mampu memberikan layanan pada anak berkebutuhan khusus, ruang sumber yang kurang memadai, fasilitas yang kurang memadai seperti belum terdapat tangga landau untuk anak yang menggunakan kursi roda, serta kamar mandi khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka menarik untuk dilakukan penelitian di SDN Mentikan 1 Mojokerto untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan fungsi manajemen pendidikan inklusif di sekolah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka akan diuraikan hasil penelitian tentang fungsi manajemen pendidikan inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto. Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1) mendeskripsikan fungsi perencanaan (*planning*) dalam pelaksanaan manajemen pendidikan di sekolah inklusif SDN Mentikan 1 Mojokerto. 2) mendeskripsikan fungsi pengorganisasian (*organizing*) dalam pelaksanaan manajemen pendidikan di sekolah inklusif SDN Mentikan 1 Mojokerto. 3) mendeskripsikan fungsi pelaksanaan (*actuating*) dalam pelaksanaan manajemen pendidikan di sekolah inklusif SDN Mentikan 1 Mojokerto. 4) mendeskripsikan fungsi pengawasan (*controlling*) dalam pelaksanaan manajemen pendidikan di sekolah inklusif SDN Mentikan 1 Mojokerto.

METODE

Penelitian ini telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016: 14) metode penelitian naturalistik, sering menjadi sebutan dari metode penelitian kualitatif, dikarenakan

pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada keadaan yang alamiah (*natural setting*); yang juga disebut dengan metode etnografi, dikarenakan pada mulanya metode ini lebih banyak digunakan dalam penelitian bidang antropologi; serta disebut dengan metode kualitatif, karena data yang dikumpulkan dan analisisnya lebih memiliki sifat pada kualitatif. Selanjutnya penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki maksud guna memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti persepsi, perilaku, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2005: 6). Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan definisi penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menggali informasi melalui memerhatikan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar objek penelitian. Penelitian kualitatif ini untuk mendeskripsikan model fungsi manajemen pendidikan inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto.

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan metode deskriptif. Menurut Nazir (2011: 54) pengertian metode deskriptif ialah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Lebih lanjut, tujuan penelitian deskriptif ialah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa metode deskriptif adalah metode penelitian yang berupaya memberi gambaran serta memperjelas masalah yang aktual atau yang sedang muncul saat sekarang.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini dikategorikan sebagai studi deskriptif. Karena penelitian ini memiliki tujuan memberi gambaran mengenai fenomena yang sedang terjadi seputar pendidikan inklusif dan juga mampu menjawab fokus penelitian. Diperlukan multi sumber data dalam penelitian ini, maka dengan metode deskriptif akan diperoleh berbagai sumber data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait fungsi manajemen pendidikan inklusif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Sebagaimana dalam pedoman wawancara semua pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya meliputi beberapa aspek: (a) perencanaan (*planning*), (b) pengorganisasian (*organizing*), (c) pelaksanaan (*actuating*), dan (d) pengawasan (*controlling*). Adapun yang telah diwawancarai dalam penelitian ini ialah kepala sekolah sebagai dengan kode WKS, tata usaha dengan

kode WTU, koordinator pendidikan inklusif dengan kode WKI, guru pendamping khusus dengan kode WGP, guru kelas dengan kode WGK. Observasi yang diterapkan adalah observasi non partisipan, yang mana tidak adanya keterlibatan secara langsung dalam keadaan yang diamati dengan menggunakan pedoman observasi terstruktur yang disiapkan. Kelas yang menjadi sasaran observasi adalah kelas IV. Dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pada penelitian ini dokumentasi meliputi: profil sekolah yang mencakup data guru dan data siswa, perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), materi pembelajaran, LKS, dan lembar penilaian, foto sarana dan prasarana sekolah, SK dari kepala sekolah ataupun pihak lain yang terkait dengan fokus penelitian.

Hasil data yang telah dikumpulkan perlu agar didapatkan keabsahan data, sehingga dibutuhkan suatu teknik pemeriksaan untuk diuji kemantapan dan kebenarannya. Penelitian kualitatif ini keabsahan data berfungsi untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Menurut Wilian Wiersma (dalam Sugiyono, 2016: 372) "*triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures*". Triangulasi pada uji keabsahan data, didefinisikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Sehingga dapat dikatakan bahwa menurut Sugiyono (2016: 373) terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Data yang diperoleh dari berbagai sumber data satu dan yang lain akan dibandingkan atau dicek berdasarkan teknik pengumpulan data dengan tujuan menggali informasi yang lebih dalam.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 31-33) yang menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Kondensasi Data (*Data Condensation*). Kondensasi data mengarah pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang diperoleh saat penelitian berlangsung. Adapun arti dari kondensasi mengarah pada penguatan data. Model sebelumnya menggunakan istilah reduksi yang memiliki arti mengurangi data. Sedangkan dalam kondensasi data tidak dihilangkan, melainkan dirangkum, diparafrase, ataupun digabungkan dengan data yang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dipaparkan data-data yang

sudah terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah dipaparkan, data-data difokuskan atau disederhanakan untuk dapat digabungkan dengan data yang lain. 2) Penyajian data (*Data Display*). Pada tahap ini data diorganisir, disatukan, dan memungkinkan untuk diambil kesimpulan. Penyajian data membantu dalam pemahaman apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk dalam analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini data-data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif. Juga disertai dengan hasil wawancara sesuai pedoman wawancara, hasil observasi sesuai pedoman observasi, dan hasil dokumentasi sesuai pedoman dokumentasi. 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*drawing and verifying conclusions*). Langkah terakhir ialah menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi. Penarikan kesimpulan diperoleh dari kumpulan data yang telah diambil, kemudian dilakukan verifikasi terus menerus selama proses penelitian dilaksanakan agar data yang diperoleh terjamin keabsahan dan objektivitasnya, sehingga kesimpulan terakhir dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan dari penelitian kualitatif mengharuskan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berbentuk deskriptif suatu objek yang masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Sedangkan verifikasi ialah upaya pembuktian kembali benar atau tidaknya kesimpulan yang telah dibuat, atau sesuai tidaknya kesimpulan dengan kenyataan. Upaya verifikasi dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data ulang atau dengan melakukan triangulasi.

Hasil penelitian yang telah diperoleh kemudian diperiksa dengan terpenuhi atau tidaknya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Arikunto (2013: 245) menyatakan bahwa agar dapat mengetahui telah terpenuhi tidaknya kriteria yang ditetapkan, maka perlu menggunakan lembar pengamatan. Kemudian diambil salah satu substansi manajemen pendidikan dari Badan Standar Nasional Pendidikan yakni standar proses, yang memiliki format kriteria penilaian yang diadopsi dari instrument akreditasi sekolah dasar oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah tahun 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian berisi hasil dari analisis data penelitian yang telah diorganisasi dengan baik. Data penelitian disajikan secara informatif, komunikatif, serta relevan dengan masalah serta tujuan penelitian. Dalam bab ini, hasil penelitian berupa deskripsi. Analisis yang disajikan dalam uraian bersifat kualitatif yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Hasil

penelitian ini ialah pemaparan data hasil penelitian yang berhasil didapat melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap peristiwa dan hasil kajian terhadap beberapa dokumen yang dipilih oleh penelitian.

1. Fungsi Perencanaan (*planning*) dalam Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto

a. Hasil wawancara

Perencanaan merupakan rancangan kegiatan atau rancangan tujuan yang akan dicapai. Perumusan tujuan suatu sekolah terdapat visi dan misi sekolah. Perumusan visi dan misi sekolah yang dilakukan oleh SDN Mentikan 1 Mojokerto melibatkan kepala sekolah dan guru di SDN Mentikan 1 Mojokerto.

Kegiatan perumusan tujuan di sekolah, dapat berisi dari tujuan jangka panjang, menengah, dan pendek atau tahunan. Sehingga terdapat pula visi dan misi sekolah, juga RKS (Rencana Kerja Sekolah) yang perumusannya melibatkan guru dan kepala sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat WKS, "*Dalam perumusan visi dan misi dilakukan oleh semua stakeholder, yang termasuk komite sekolah, pengawas, guru-guru, dan kepala sekolah*". Serta adanya RKS yang menyatakan, "*Ada, jangka panjang, menengah, dan tahunan*".

Hal ini sependapat dengan WKI yang menyatakan, "*Kebetulan kalau tentang permasalahan visi dan misi sekolah kita setiap tahun melaksanakan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dan relevansi dari visi, misi dan tujuan sekolah tersebut kita adakan setiap tahun sekali pada awal tahun, sekitar bulan januari, dan untuk kegiatan tersebut seluruh komponen sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, staf, bahkan penjaga dan anggota komite sekolah pun terlibat dalam proses evaluasi visi, misi, dan tujuan sekolah*". Kemudian adanya RKS dengan pernyataan WKI, "*Untuk permasalahan perencanaan keuangan memang ada beberapa macam jenis perencanaan ya, mulai dari rencana kerja tahunan (RKT), rencana kerja tahun sementara (RKTS), dan rencana kerja anggaran sekolah itu kita per tahun. Kalau kita bicara RKT itu periodenya empat tahun sekali, dan untuk RKS itu ada per tahun, pada awal tahun ajaran baru. Itu kita melaksanakan perencanaan anggaran*".

Sejalan dengan WTU tentang pembuatan visi dan misi sekolah yang menyatakan, "*Semuanya ikut serta, dari kepala sekolah,*

guru, komite sekolah, staf, dan penjaga juga terlibat”. Serta terdapat RKS bahwa, “ada, beberapa macamnya, mulai dari yang tahunan, sementara, dan rencana kerja anggaran sekolah. Dan RKT itu periodenya empat tahun sekali, untuk RKS ada per tahun, saat tahun ajaran baru”.

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat WGK yang menyatakan, “iya, pake dirapatkan itu biasanya sosialisasi guru”. Sementara pada adanya RKS bahwa, “iya biasanya kalau sebelum penyusunan itu biasanya pada waktu liburan”.

Kemudian dengan pendapat WGP tentang perumusan visi dan misi, “kalau visi misi, iya, biasanya tiap tahun ada rapat evaluasi tentang visi misi, juga perumusan rencana-rencana yang lain”. Sedikit berbeda dengan yang lain, pada terdapatnya RKS, WGP menyatakan, “iya, ada, meskipun hanya wacana, namun ada juga yang terlaksana ada juga yang belum terlaksana, karena pelaksanaan inklusif di sini masih baru atau juga masih merintis jadi masih berjalan pelan-pelan”.

Perencanaan juga terdapat sumber daya, yang terdiri dari pendanaan atau disebut Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan kurikulum yang digunakan, ketersediaan alat dan sumber belajar, serta merekrut tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kualifikasi. Hal ini sependapat dengan WKI yang menyatakan, “iya, di sini yang kelas satu dan empat menggunakan K13, kalau yang lain masih menggunakan KTSP”. Kemudian pada perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan WKI menyatakan, “permasalahan tentang tenaga pendidik dan kependidikan ya, yang jelas di sekolah kita untuk tenaga pendidik guru kelas memang semuanya sudah pegawai negeri sipil, dan aturan dari pemerintah juga guru yang memegang kelas juga harus PNS. Untuk aturan masuk, kalau yang guru non PNS memang kriterianya harus satu, memiliki ijazah yang linier, kedua yang jelas berkelakuan baik, membuat surat lamaran, tetapi untuk tahun ajaran 2018 ini memang di Kota Mojokerto sekolah dilarang mengangkat atau mengambil atau mempekerjakan guru gtt maupun ptt batu. Karena sehubungan dengan kebijakan walikota Mojokerto bahwa kebijakan pengangkatan gtt atau ptt di sekolah itu sepenuhnya hak dari dinas pendidikan atau pemerintah Kota Mojokerto tadi”. Kemudian tentang informasi

rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan menyatakan, “kalau permasalahan rekrutmen guru kemarin kita kebetulan kita akan mencari dan merekrut guru shadow atau GPK baru, cuman nanti kita lihat lagi sumber pendanaan dari kegiatan tersebut dari mana. Ketika kita sumber pendanaan dari dinas pendidikan, seperti kemarin shadow dan GPK, kita rekrutmennya melalui dinas pendidikan. Jadi dinas pendidikan sepertinya memiliki selebaran atau pengumuman yang ditempel di dinas pendidikan sendiri, ditempel di papan pengumuman. kemarin ada pengumuman rekrutmen shadow dan GPK untuk SDN Mentikan 1 dan SDN Wates 1 sebagai penyelenggara inklusif. dan untuk sekolah sendiri, ketika kita membutuhkan tenaga kita hanya memampang di papan pengumuman dan sambil dari mulut ke mulut aja. Kita kabarkan ke kerabat terdekat yang membutuhkan pekerjaan, yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Seperti itu. Jadi ada dari dinas, ada dari sekolah juga, tergantung sumber pendanaan juga”. Dilanjutkan dengan ada tidaknya tes yang menyatakan, “kalau tes kita biasanya sekiranya kita lihat guru-guru GPK, surat lamarannya, keperluannya apakah ijazahnya darimana lulusannya, trus permasalahan tes kita kemarin ada sarjana matematika kalau ndak salah, kita berikan waktu 3 bulan untuk training dan tes. Ternyata seiring berjalannya waktu, ada ketidakcocokan atau ketidaksesuaian terhadap kemampuan juga, dan itu diputuskan tidak bisa diterima. Jadi tes secara praktik, ada”.

Sejalan dengan pernyataan WKS tentang RKAS dan kurikulum, “iya ada, di sekolah ini kami menggunakan K13 untuk kelas I dan IV, dan yang lain masih menggunakan KTSP”. Namun pada sarana prasarana yang menunjang pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus WKS menyatakan, “Belum, kalau di sini belum karena kita sudah mengajukan beberapa kali ke dinas terkait (sarana prasarana pendidikan inklusif), namun belum ada tindak lanjutnya. Jadi sampai saat ini kita untuk sarana prasarana belum terpenuhi seratus persen, contoh kamar mandi untuk ATD belum ada, sarpras di ruang kelas belum memenuhi syarat, alat peraga belum lengkap, buku-bukunya juga belum lengkap”. Selanjutnya tentang informasi rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan menyatakan, “kalau untuk

menambah shadow seperti kemarin, kita sama dinas diumumkan, namun yg lulusan PLB hanya sedikit, yang lain hanya dari umum, yg umum seperti lulusan SI Matematika, SI IPA itu dari dinas yang mengumumkan, bukan kita. Karena masalah perekrutan itu hak dinas pendidikan, sesuai dengan apa ini, yang diberikan tunjangannya, juga melalui dinas. Tapi setelah diumumkan sampai saat ini, belum ada perekrutan". Selanjutnya tentang persyaratan rekrutmen tenaga pendidik, "iya ada, lulusan SI, kemudian untuk guru inklusif itu dari lulusan PLB atau psikolog, dan yang lain paling tidak harus lulusan PGSD". Dilanjutkan dengan ada tidaknya tes, "alasan dinas saya tanyakan, (jawabnya) tidak ada dana atau biaya untuk ngetes perekrutan shadow di sekolah inklusif. mestinya pelaksanaan ada tes, namun sampai hari ini tidak belum tes. karena dinas bilang ke saya belum ada dana / biaya. Maunya ada tes, namun sebelum itu kita ambil itu pokok e lulusan dari PLB saya terima. Satu itu. Yang lainnya belum. Tidak pake tes".

Hal ini diperkuat dengan pendapat WGK tentang perencanaan RKAS dan kurikulum menyatakan, "iya pembuatan perencanaan-perencanaan seperti itu biasanya dilaksanakan saat liburan sekolah". pada sarana prasarana penunjang pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus, menyatakan, "biasanya saya pakai LCD ini, karena slow learner yang tidak terlalu parah, jadinya dia mampu memahami gambar dan video yang mudah-mudah". Persyaratan rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan menyatakan, "kalau untuk yang inklusif, biasanya itu ada dari lulusan PLB, kalau untuk guru kelasnya itu ada dari umum". Adapun mengenai informasi rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan, pendapat WGK, "kalau yang seperti BA itu dari dinas. Infonya dari dinas, disuruh kesini, nanti lamarannya ke dinas. Begitu. Kalau guru kelas ini ikut pendaftaran umum. Ikut web atau pendaftaran umum. Kalau saya ikut rekrutmen yang umum melalui pemerintah kota, yang kemudian ditunjukkan ada lowongan apa saja". Dilanjutkan ada atau tidaknya tes menyatakan, "kalau saya dulu ikut tes yang dari pemerintah kota, yang nantinya akan ditunjuk untuk ke sekolah mana saja".

Kemudian selaras dengan pendapat WTU tentang RKAS dan kurikulum yang digunakan, menyatakan "di sekolah ini K13 digunakan oleh

kelas satu dan empat, kalau yang lain masih KTSP". Pada persyaratan bagi tenaga pendidik dan kependidikan menyatakan, "kalau persyaratannya membuat surat lamaran, memiliki ijazah linier, berkelakuan baik". adapun penyebaran informasi perekrutan tenaga pendidik yakni menyatakan, "karena yang memiliki hak perekrutan adalah dinas pendidikan, jadi dinas pendidikan yang memberi pengumuman kalau ada atau dibutuhkan guru di suatu sekolah". serta dilanjutkan dengan pernyataan, "kalau untuk guru pendamping khusus, saat ini tidak ada tes, karena belum ada biasa untuk tes dari dinas. Jadi diterima dengan syarat lulusan dari PLB atau Psikologi".

Sementara diperkuat dengan pernyataan WGP tentang RKAS dan kurikulum, "kalau pembuatannya iya semua komite sekolah, guru, kepala sekolah itu diikutsertakan". Adapun persyaratan bagi tenaga pendidik dan kependidikan menyatakan, "untuk rekrutmen guru itu, yang inklusif ya, itu harus dari lulusan psikologi atau PLB, karena kekurangan gurunya itu pak A ditaruh di TU karena masih belum bisa mengatasi". Kemudian pada informasi rekrutmen tenaga pendidik WGP menyatakan, "kalau karena wacana dari dinas itu menjanjikan, setiap kelas ada dua atau satu guru GPK, dan saya sudah naruh lamaran hingga sekarang belum ada kejelasan. Dan karena wacana dari dinas seperti itu jadi perekrutan guru melalui dinas pendidikan saja". Dilanjutkan dengan ada tidaknya tes, "kalau rekrutmen guru yang saya, dari sekolah sih tidak ada tes, hanya wawancara biasa saja, kalau dari dinas, karena belum tau".

Selanjutnya, dalam perencanaan juga terdapat rencana teknik/metode yang dipilih sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Adapun teknik yang digunakan berupa meningkatkan kompetensi bagi tenaga pendidik dan kependidikan, menyusun RPP dan PPI. Hal ini sejalan dengan pendapat WGP yang menyatakan, "biasanya kita ikut seminar, workshop juga, kemarin juga habis mengikuti workshop tentang pendidikan inklusif, terus kepala sekolah juga ada studi banding". Namun untuk penyusunan PPI yang belum berjalan, dengan pernyataan, "karena PPI belum berjalan, yang dikarenakan siswa inklusif yang banyak dan guru yang terbatas, jadi belum mampu untuk mengatasi pembuatan PPI".

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan WKI yang menyatakan, “meningkatkan kompetensi kita biasanya setiap tiga bulan sekali ada pengarahan dari kepala sekolah, kemudian kita mendaftarkan guru-guru kita untuk mengikuti kegiatan workshop, seminar kerja, dan lain-lain. Dari dinas pendidikan setiap tahun juga ada kegiatan untuk peningkatan mutu pendidikan, seperti workshop dinas pendidikan sendiri, dinas pendidikan provinsi juga ada workshop biasanya tiap tahun dua kali, untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan”. Serta dalam pelaksanaan PPI yang menyatakan, “untuk PPI memang dalam satu dua tahun ini kita belum bisa membuatnya, karena memang sehubungan dengan tenaga yang ada. Dulu awal-awal tahun 2013, 2014, 2015, memang setiap tahun atau setiap awal tahun pembelajaran, saya selalu membuat PPI untuk anak-anak, karena memang pada waktu itu siswanya jumlahnya sedikit, saya juga masih fokus ke inklusif, tapi untuk saat ini memang kita belum bisa menyusun PPI karena memang kendala kegiatan yang terlalu banyak. Karena memang GPK yang asli memang saya, dari lulusan Pendidikan Luar Biasa, dan yang lain memang psikolog juga baru masuk, belum bisa membuat PPI juga”.

Kemudian selaras dengan pendapat WKS tentang meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan bahwa, “ada workshop, seminar juga ada. Diklat juga, yang utusan dari dinas juga ada”. Serta sesuai juga dengan pendapat WTU yang menyatakan, “ada workshop, seminar, diklat juga. Dinas pendidikan juga mengadakan workshop untuk meningkatkan mutu pendidikan, dinas provinsi juga ada setiap tahun”.

Selanjutnya dengan pendapat tentang meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan WGK menyatakan, “selama ini yang sudah ada, itu pernah mengundang salah satu SLB, itu kan sebagai sekolah sumber inklusif. Kita kan kadang guru-guru tidak mengerti bagaimana cara penanganan anak-anak berkebutuhan khusus, ya dari kegiatan tersebut kita bisa paham. Untuk seminar juga iya ada, biasanya dari dinas, seperti sekolah ini ditunjuk untuk mengirimkan salah satu guru untuk mengikuti bimtek, begitu”. Namun untuk perumusan PPI menyatakan, “untuk program pembelajaran individual belum berjalan, ya karena kekurangan tenaga ini”.

b. Hasil Observasi

Hasil observasi menunjukkan fungsi perencanaan (*planning*) dalam pelaksanaan Manajemen Pendidikan Inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto bahwa sumber daya yang digunakan ialah meliputi pendanaan, sarana prasarana, dan tenaga pendidik dan kependidikan.

Berdasarkan observasi dilakukan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia telah dimanfaatkan atau difungsikan dengan baik seperti adanya ruang sumber bagi peserta didik berkebutuhan khusus, ruang kelas, ruang guru, ruang UKS, tempat ibadah seperti masjid, kantin, toilet, taman, tangga sekolah, serta lapangan sekolah.

Kemudian juga terdapat media pembelajaran yang menunjang kegiatan belajar peserta didik berkebutuhan khusus, seperti balok bangun ruang, pamphlet bergambar, dan alat berhitung. Serta terdapat juga buku siswa bagi siswa kelas satu dan kelas empat serta alat bantu bagi seluruh siswa seperti LCD.

2. Fungsi Pengorganisasian (*organizing*) dalam Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto

a. Hasil wawancara

Pengorganisasian dalam pendidikan inklusif dapat diartikan sebagai menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan, yang dapat mencakup pembentukan panitia penerimaan siswa berkebutuhan khusus dan pembagian peran/tugas guru, psikolog, konselor, dan pendamping. Hal ini sesuai dengan pernyataan WTU, “ada, yang terdiri dari guru lulusan PLB dan psikologi”. Serta lebih lanjut, “yang kita terima masih sebatas *slow learner* dan tunadaksa ringan. Yang sekiranya mampu didik, karena kalau kita menerima jenis peserta didik berkebutuhan khusus yang lain, kita masih terbatas pada tenaga pendidiknya, serta juga sarana prasarana yang kurang terpenuhi”. Kemudian pembagian tugas dan peran pendapat WTU, “iya sudah menurut tupoksinya masing-masing, jadi harus dilaksanakan sesuai dengan pembagiannya”.

Hal tersebut sejalan dengan WGP yang menyatakan, “iya terlibat. Ada tim untuk penerimaan siswa berkebutuhan khusus, saya juga termasuk. Dan kalau penerimaan peserta didik sekarang tidak boleh ada tes, kalau anak kelas satu kita lebih ke observasi, jadi dilihat mana yang inklusif atau tidak”. Dilanjutkan

dengan pernyataan, “kalau di sini seperti tunanetra, tunarungu, itu belum kita terima, kita hanya menerima yang *slow learner* saja, karena alat bantu dan sebagainya itu belum ada, juga tenaga pengajarnya itu nggak ada, terus anaknya juga banyak kan, jadi ya itu faktornya karena tenaga pengajar yang belum mencukupi. Biasanya di sini gangguan perilaku, dan gangguan belajarnya seperti *slow learner* tadi. Kalau kelas enam kemarin ada tunagrahita ringan, yang sudah lulus”. Kemudian peran GPK di dalam seting kelas inklusif, menyatakan, “kalau di kelas inklusif, di dalam kelas reguler, saya tidak ikut, ya karena kekurangan tenaga, jadi saya di ruang sumber atau ruang inklusif ini”.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan WKI tentang jalur penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus yang menyatakan, “ketika PPDB tahun 2018 memang ada Peraturan dari pemerintah Kota Mojokerto bahwa untuk penerimaan peserta didik baru kelas satudilaksanakan tanpa tes. Jadi secara tidak langsung semua peserta didik yang memenuhi persyaratan wajib diterima. Dan kalau kita bicara mengenai peserta didik baru inklusif, kemarin kita mencari dari 28 siswa didik yang diterima kita asesmen dan kita cari siswa yang berkemampuan paling rendah dan kita masukkan ke siswa inklusif atau kita kategorikan siswa inklusif berkebutuhan (khusus). Cuma kalau kita rekrutmen peserta didik inklusif secara khusus, tidak ada. Karena memang nanti berbenturan dengan peraturan dari walikota juga, bahwa setiap peserta didik yang memenuhi persyaratan wajib diterima dan tidak boleh ada tes”. Kemudian dilanjutkan, “kalau masalah jenis ketunaan, kita memiliki kriteria, yang jelas ketika kita di sekolah inklusif, sekolah inklusif itu kan sekolah reguler yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus, secara tidak langsung kita orientasinya ke pendidikan atau ke kognitif. Jadi secara tidak langsung kita penerimaan siswa itu ya siswa yang mampu didik. Jadi dia calistung bisa, dan biasanya yang kita terima itu kategori *slow learner*, tunadaksa ringan ada kemarin. Yah maksimal *slow learner*, kalau kita menerima seperti tunagrahita, tunarungu, atau tunanetra, tu secara tidak langsung kita dari segi pendidikannya juga kurang, dari sarana prasarana pendukung juga kurang memenuhi”. Serta dengan berkas yang dibutuhkan, WKI

menyatakan, “berkas-berkasnya seperti pengisian formulir pendaftaran, KTP ayah dan ibu, kartu keluarga, akte kelahiran, map, ijazah TK/Paud. usia anak 6-7 tahun, dan yang diprioritaskan anak yang rumahnya dekat dengan sekolah. Serta juga melampirkan hasil tes IQ dari rumah sakit provinsi”. Serta WKI juga mengatakan tentang pelaksanaan identifikasi dan asesmen, “untuk pelaksanaan identifikasi asesmen itu kita di sini punya satu tenaga psikolog ya, yang melaksanakan semuanya psikolog kita, pelaksanaan asesmen dan identifikasi”.

Hal tersebut diperkuat dengan WKS yang menyatakan, “ada, tim kita ya dari psikolog, yang saya ajukan ke dinas, namun belum dapat honor, kemudian sama dari lulusan PLB kami libatkan untuk asesmen anak-anak yang sekiranya ada terindikasi untuk ke anak-anak berkebutuhan khusus”. Dilanjutkan dengan pernyataan, “tidak, kita ambil hanya *slow learner* dan tunadaksa. Karena kita belum mampu ambil selain ke arah tunadaksa dan *slow learner*. Kemarin ada yang di sini tunagrahita, karena dekat lingkungan sini, dekat rumah, akhirnya kita ambil, jadi masuk sini, dan perintah dinas disuruh menerima. Ada satu tunagrahita satu. Namun sebetulnya nggak satu, kemarin-kemarin itu autisme ada, ganda juga ada”. Kemudian pembagian peran dan tugas, WKS menyatakan, “pembagian tugasnya sesuai tupoksinya masing-masing, kita bagi serta ada SK nya dan harus dilaksanakan sesuai dengan SK yang kita berikan”.

Kemudian WGK berpendapat tentang penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus yakni “biasanya yang dari PLB, kan yang lebih tau, jadi tahu layanan yang diperlukan untuk anak berkebutuhan khusus seperti apa saja. Kalau saya hanya membantu dalam pembelajarannya saja”. Namun WGK berpendapat tentang persyaratan khusus bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus menyatakan, “itu yang lebih tahu dari guru lulusan PLB, kan setiap kelas dibatasi lima siswa inklusif, jadi kepala sekolah dan guru lulusan PLB yang lebih paham”. Lebih lanjut tentang penempatan kelas bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus, WGK menyatakan, “biasanya saya taruh di depan, kalau di belakang malah tidak kelihatan. Pokonya di depan, yang mudah dijangkau. Karena ada dua siswa inklusif di kelas ini, saya letakkan di

bangku bersebelahan dengan siswa reguler, agar temannya dapat membantu siswa tersebut belajar”.

Selanjutnya dalam pengorganisasian juga terdapat sub aspek mengugaskan seseorang / kelompok orang, yang mencakup membagi tugas sesuai dengan struktur organisasi sekolah. Hal ini sesuai dengan pernyataan WGK yang menyatakan “iya sesuai pembagian tugas guru”. Serta pernyataan WGP, “iya, sudah sesuai”. Kemudian pernyataan WKI tentang kesesuaian pembagian tugas dengan struktur organisasi sekolah, “iya, sesuai”. Begitu pula dengan pernyataan WTU, “iya, sesuai”. Yang kemudian diperkuat dengan pernyataan WKS, “iya sesuai”.

Terdapat juga sub aspek dalam pengorganisasian yakni mendelegasikan wewenang, yang mencakup pendelegasian guru/staf sekolah untuk menghadiri kegiatan di luar sekolah dan mendelegasikan siswa-siswi untuk mengikuti lomba-lomba. Hal ini sesuai dengan pendapat WGP yang menyatakan, “ada, biasanya ada seminar, diklat, workshop juga”. Serta pendelegasian siswa-siswi, “ada siswa inklusif, sempat ikut ada lomba bercerita lomba inklusif, yang sistemnya direkam lalu dikirim, jadi tidak datang ke lokasinya”.

Hal tersebut sependapat dengan pernyataan WKI, “ada, biasanya ada workshop, seminar, diklat juga”. Sementara pada pendelegasian siswa-siswa dalam lomba, menyatakan “kalau masalah lomba kemarin ada salah satu siswa inklusif kita itu tunadaksa, mengikuti lomba Bahasa Inggris, dan dia memang memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang bagus”.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan WKS, “biasanya penataran, diklat, workshop, itu kita kirim. Biasanya diminta dinas, itu kita kirim. Kemarin ada seminar internasional tentang inklusif, kita ikut sendiri, bayar sendiri”. Serta pendelegasian siswa-siswi untuk mengikuti lomba, menyatakan “pernah mengikuti lomba Bahasa Inggris, namun belum dapat juara. Kemudian ada juga lomba menyanyi, dan mendapat juara satu se Kota Mojokerto, dan itu dari anak slow learner. Mengikuti lomba menyanyi tunggal”.

Kemudian dengan pendapat WGK yang menyatakan, “iya, ada, biasanya dinas yang menunjuk sekolah untuk mengirim guru mengikuti bimtek, juga ada seminar dan workshop”. Serta pada delegasi siswa-siswi

menyatakan, “biasanya kalau acara inklusif itu anak-anak diikutkan. Biasanya sekolah sumber mengadakan lomba bagi siswa inklusif, anak-anak ini diikutkan tampil”.

b. Hasil Observasi

Dari hasil observasi, fungsi pengorganisasian dalam pelaksanaan manajemen pendidikan inklusif bahwa pembagian tugas dan peran guru sesuai dengan kelas yang diampu, juga peran psikolog sebagai tenaga guru pendamping siswa berkebutuhan khusus. Kemudian pembagian tugas yang sesuai dengan struktur sekolah, yang karyawan telah menjalankan tugas dengan sesuai seperti penjaga sekolah, kepala sekolah, serta guru kelas.

Adapun penjabaran struktur sekolah ialah sebagai berikut:

Komite Sekolah : Drs. Aswanto B, MM

Kepala Sekolah : Sri Kusumaningsih, S.Pd MM

Tata Usaha : Susi Hartin, S.E

Perpustakaan : Rosyos R, S.Pd

Guru Kelas 1 : Suyatmi, S.Pd

Guru Kelas 2 : Soewarni, S.Pd.SD

Guru Kelas 3 : Andayani, S.Pd.SD

Guru Kelas 4 : Iis Dwi, S.Pd.SD

Guru Kelas 5 : Miftachul C, S.Pd

Guru Kelas 6 : Sulam S, S.Pd

Guru Olahraga : Drs. Agoeng D

Guru PAI : Mahfudi, A.Ma

Guru Pendamping Khusus : M. Arifin, S.Pd

Guru Pendamping Khusus : Rindung U, S.Pd.SD

Guru Ekstrakurikuler TPQ : Wahyudi

Guru Ekstrakurikuler Komputer : Eko H, S.Pd.SD

Guru Ekstrakurikuler Tari : Halimah

Guru Ekstrakurikuler B. Inggris : Cicih S, S.Pd

Guru Ekstrakurikuler Samroh : Hartin, SE

Guru Ekstrakurikuler Olimpiade: Nawang R D, S.Pd

Guru Ekstrakurikuler Pramuka : Elyya Wahyuni

Guru Ekstrakurikuler PAK : Yevie Yolanda

Satpam : Mardi Urip

Penjaga Sekolah : Paidi

3. Fungsi Pelaksanaan (actuating) dalam Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto

a. Hasil wawancara

Fungsi pelaksanaan dalam manajemen pendidikan inklusif yakni menyelenggarakan pendidikan yang telah direncanakan yang meliputi melaksanakan pendidikan yang telah direncanakan, dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP dan PPI yang

telah disusun, serta mengarahkan warga sekolah agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kualifikasi masing-masing. Sesuai dengan pernyataan WKS, “iya, harus sesuai dengan RPP nya”. Serta mengarahkan warga sekolah, berpendapat, “dari awal masuk ke sekolah ini, guru-guru sudah diberikan tugas yang sesuai dengan kualifikasinya masing-masing, jadi bisa dipantau juga melalui rapat evaluasi, juga saat hari-hari efektif biasa”.

Sejalan dengan WTU menyatakan bahwa RPP yang disusun sesuai dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian tentang mengarahkan warga sekolah agar melaksanakan tugas sesuai kualifikasinya, WTU menyatakan, “di sini melaksanakan tugasnya sudah ada pembagian masing-masing, sehingga dari awal sudah diarahkan sesuai kualifikasinya”.

Kemudian dengan pendapat WKI, “kalau PPI yang belum berjalan, dan kalau RPP iya harus sesuai dengan pelaksanaan pembelajarannya”. Serta tentang pengarahan tugas dilanjutkan dengan pernyataan, “sejak saya kesini sudah diberi tugas sesuai dengan kualifikasi saya sebagai guru PLB, yang jadi guru siswa berkebutuhan khusus, jadi sudah terarah”.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan WGP, “ya, pembelajarannya sesuai dengan RPP”. Lebih lanjut tentang mengarahkan warga sekolah, “dari awal sudah diarahkan ke tugasnya sesuai kualifikas masing-masing guru, saya mengajar di kelas empat, yang penjaga itu ya jaga di gerbang sekolah begitu”.

Sedikit berbeda dengan pernyataan WGK, “kalau itu pembelajaran menyesuaikan anaknya, kalau anaknya mau melakukan ya sudah baik, sudah bagus, jadi kadang sesuai RPP kadang juga tidak”. Serta dilanjutkan dengan mengarahkan tugas, “guru-guru sudah diberikan tugas yang sesuai dengan kualifikasinya masing-masing, seperti salah satunya saya jadi GPK ini, meskipun ada juga guru yang tanggung jawabnya dobel, jadi bisa dipantau juga melalui rapat evaluasi, juga saat hari-hari efektif”.

Selanjutnya kepemimpinan dan komunikasi dengan memberi komando kepada warga sekolah agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Melalui pernyataan WKS, “kita kalau menyampaikan ada sesuatu lewat rapat ya, rapat sekolah, rapat dewan guru. Kemudian kalau wali murid kita undang, kita

sosialisasikan tentang inklusif, tentang bagaimana penanganan anak-anak berkebutuhan khusus, supaya tidak keliru. Di samping ke guru kita ke wali murid juga. Anak-anak pun, waktu kita upacara, saat berdoa waktu pagi, kita sampaikan untuk tidak diskriminatif terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, supaya mereka menyayangi, menghormati, tidak mengolok-olok”. Sedangkan dengan pendapat WKI yang menyatakan, “kalau memberi komando, biasanya kepala sekolah melalui rapat, jadi bisa tersebar ke semua guru dan karyawan sekolah”. Lebih lanjut dengan pernyataan WGP, “kalau pemberitahuan sesuatu itu biasanya lewat rapat, jadi bisa menyeluruh ke semua guru-guru, juga ada sosialisasi tentang sekolah yang inklusif itu seperti apa dan bagaimana”. Diperkuat dengan pernyataan WGK, “biasanya kalau ada pemberitahuan apa-apa itu melalui rapat guru-guru jadi biar bisa tau semuanya, kemudian juga kalau rapat ada sosialisasi tentang inklusif begitu”. Serta ditambah dengan pendapat WTU, “biasanya kalau ada apa-apa, menyampaikan berita itu lewat musyawarah atau rapat, sehingga bisa tau semua guru dan karyawan”.

Kemudian terdapat juga motivasi dan semangat agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seperti pendapat WKS, “iya, guru-guru juga biasanya laporan kepada saya tentang apa yang telah dikerjakan, hanya sekedar ingin bercerita, itu saya hargai dan memberi semangat agar terus tidak bosan, tidak lelah untuk mendidik anak-anak. Biasanya juga ada pembinaan buat guru-guru”. Sesuai dengan pernyataan WGK, “biasanya ada pembinaan dari kepala sekolah, jadi bisa memberikan semangat untuk guru-guru, juga motivasi mengembangkan kompetensi mengajar kita”. Begitu pula dengan pendapat WTU, “ya kita pernah kayak ikut seminar di luar itu termasuk motivasi juga, agar tidak bosan, agar bisa semangat kembali”. Diperkuat dengan WGP yang menyatakan, “motivasi semangat ya dari sekolah itu ada pembinaan, jadi bisa meningkatkan semangat kita untuk mengajar anak-anak, kalau anak-anak mau belajar saja itu juga sudah bikin saya makin senang buat ngajar”. Serta dengan pendapat WKI, “kalau pemberian semangat motivasi biasanya ada pembinaan dari kepala sekolah, jadi bisa

menambah wawasan guru dan staf sehingga dapat semangat kembali untuk mengajar”.

b. Hasil Observasi

Hasil observasi menyatakan bahwa observasi mengenai pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun. Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas IV bahwa pelaksanaan pembelajaran telah disesuaikan dengan RPP yang telah disusun, sehingga juga sesuai dengan tujuan dan indikator yang ingin dicapai. Namun untuk pelaksanaan PPI belum berjalan.

Selanjutnya pemberian komando pada warga sekolah juga terlihat saat kepala sekolah mengarahkan karyawan untuk melaksanakan tugasnya. Seperti meminta TU untuk mengarsipkan surat masuk dan surat keluar dari sekolah, dan meminta guru kelas untuk mendata murid di setiap kelas sebagai petugas kelas. Juga saat akan dilaksanakannya rapat petugas kelas dengan wali murid, kepala sekolah memberi wewenang kepada salah satu guru untuk mengkoordinir penataan ruang dan memberi instruksi pada guru untuk mengarahkan wali murid menuju ruang rapat.

Kemudian menjalin hubungan komunikasi yang baik antarwarga sekolah di SDN Mentikan 1 Mojokerto. Seperti saat istirahat guru saling bercerita keadaan kelas masing-masing, siswa yang menyapa dan memberi salam pada guru saat berpapasan, serta memberi senyum pada petugas satpam saat hendak keluar gerbang sekolah.

Lebih lanjut, pemanfaatan sumber daya secara optimal dengan menggunakan media atau alat bantu pembelajaran yang sesuai bagi peserta didik berkebutuhan khusus, seperti abacus, balok-balok, dan poster. Seperti saat di ruang sumber, guru meminta peserta didik berkebutuhan khusus untuk berhitung penjumlahan sederhana, sehingga peserta didik berkebutuhan khusus melakukan pejumlahan menggunakan abacus, dan saat mulai kesusahan peserta didik berkebutuhan khusus dibimbing oleh guru.

4. Fungsi Pengawasan (controlling) dalam Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto

a. Hasil wawancara

Pengawasan dalam pelaksanaan manajemen pendidikan inklusif dengan mengawasi kinerja warga sekolah. Hal tersebut sependapat dengan pernyataan WTU, “iya,

kalau pengawasan dari pemerintah ya dinas pendidikan, dan kalau dari sekolah sendiri kita juga dikoordinatori dan diawasi juga oleh komite sekolah”. serta WGK menyatakan pula, “pengawasan biasanya dari pemerintah ya dinas, atau juga dari komite sekolah”. Kemudian pendapat WGP, “pengawasan ya seadanya dari komite sekolah, dari kepala sekolah juga, jadi tiap semester itu ada laporan pengawasannya”. Kemudian diperkuat dengan pernyataan WKS, “melalui supervisi. Kita satu tahun minimal dua kali. Satu semester minimal satu kali, jadi kadang dua kali atau lebih. Melalui supervisi administrasi, supervisi pembelajaran, supervisi lingkungan, itu kita setiap pagi kita lihat lingkungan bagaimana, kita lihat kelas apakah sudah bersih atau belum, kalau pembelajaran kita melalui supervisi pembelajaran, minimal kita laksanakan satu kali tiap semester. Kemudian ada tindak lanjut setelah supervisi. Tindakan berikutnya, kita melaksanakan sesuai aturan yang ada, kemudian kita evaluasi lagi, kekurangannya apa. Kita sampaikan ke rapat”.

Selanjutnya mengukur kinerja dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan sekolah secara berkala. Sesuai dengan pernyataan WKS, “kalau tiap bulan kita laporkan. Kalau ke wali murid kita sampaikan waktu rapat wali murid saat rapat kenaikan kelas, saat penerimaan rapor. Kita juga mensosialisasikan bahwa di sekolah kita juga ada anak-anak berkebutuhan khusus”. Kemudian juga sependapat dengan WTU, “iya, biasanya melalui rapat wali murid yang setiap selesai pelaksanaan uas dan uts, kalau ke pemerintah juga ada setiap bulan”. Lebih lanjut dengan pendapat WGP, “iya, kalau pelaporannya ke wali murid biasanya saat rapat uts atau uas yang waktu kenaikan kelas, juga bisa saat wali murid menjemput pulang, itu kalau masalahnya ringan-ringan saja. Kalau ke pemerintah ya ke dinas pendidikan”. Selaras dengan pernyataan WGK, “wali murid biasanya kalau anak inklusif itu ada dua, ada yang deskripsi dan ada yang nilai. Padahal belum K13 namun tetap ada penilaian deskripsi”. Serta pendapat WKI yang menyatakan, “untuk pelaporan, iya ada ke wali murid saat penerimaan rapor, juga ke pemerintah setiap bulan”.

Kemudian terdapat membandingkan unjuk kerja dengan melakukan rapat evaluasi secara berkala. Sesuai dengan pendapat WGK

menyatakan, “biasanya ada, kalau kenaikan kelas, bagaimana perkembangan anak ini, ditanya satu-satu sama kepala sekolah. Dan yang laporan guru kelasnya, bila perlu orang tuanya juga dipanggil”. Sependapat dengan pernyataan WGP, “iya. Kalau guru kita biasanya dievaluasi bersama dengan kepala sekolah, misalkan ada yang kurang langsung diperbaiki, tidak diserahkan ke dinas atau wali murid. Kalau murid, kita evaluasi bersama guru, tapi tidak diserahkan ke pemerintah. Kalau ke orang tua, tidak secara tertulis tapi biasanya seperti orang tuanya dipanggil, atau masalahnya tidak terlalu berat, bisa kita sampaikan langsung saat orang tuanya menjemput”. Selanjutnya dengan pendapat WTU, “iya, kita melakukan rapat evaluasi berkala di tiap semester, kalau evaluasi yang setiap bulan, kita bahas atau kita evaluasi di rapat tiap semester”. Serta dengan WKI yang menyatakan, “kegiatan evaluasi biasanya kita ada uts, uas. Pelaporan hasil evaluasi kita laksanakan dan kita sampaikan pada orang tua yang pasti, dan untuk ke dinas pendidikan sendiri kita melampirkan daftar nilai saja, atau kita melaporkan secara lisan saja bahwa hasil evaluasi atau hasil uts dan uas siswa inklusif seperti ini, begitu”. Diperkuat dengan pernyataan WKS, “kita melakukan rapat evaluasi berkala setiap semester, jadi dari laporan tiap bulan itu kita juga evaluasi di rapat evaluasi tiap semester tersebut”.

Untuk pengawasan dari pemerintah sehingga sependapat dengan pernyataan WKI, “ada, pengawasan dari pemerintah di sini ya dinas pendidikan”. Sejalan dengan pendapat WTU, “iya, pemerintah ini disini ya dinas pendidikan”. Kemudian juga dengan pendapat WKS, “pemerintah selama ini dinas pendidikan itu, masih kurang tentang pengawasannya. kalau kita laporan, baru beliaunya “oh iya di sini” kalau kami idak laporan, ya tidak. Jadi kurang lah perhatian dan pengawasan dari pihak pemerintah Kota Mojokerto. Itu yang kami sayangkan, perhatian dan pengawasan, serta pedulinya masih kurang”. Adapun pendapat WGK, “ada, pengawasan dari dinas pendidikan”. Serta pendapat WGP, “iya ada pengawasan, namun tidak terlalu detail, hanya sekedar saja. Ya mungkin karena Kota Mojokerto ini masih membangun inklusif nya, masih baru, belum enam tahun, jadi merintis pelan-pelan, gitu mungkin”.

b. Hasil Observasi

Dari hasil observasi, bahwa mengawasi kinerja warga sekolah dengan pengawasan kepala sekolah dengan mengecek tugas yang dilaksanakan oleh guru-guru. Seperti dengan adanya daftar hadir setiap hari dan mengingatkan jadwal menjaga kantin sekolah. serta sesekali kepala sekolah berkeliling di setiap kelas.

Kemudian kepala sekolah juga mengawasi dengan cara bertanya pada guru tentang tugas yang sedang atau telah dikerjakan, seperti meminta laporan guru kelas di setiap kelas, serta bertanya tentang perkembangan peserta didik yang diberi tanggung jawab.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya fungsi perencanaan (*planning*) dalam Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto, yang dilakukan dengan persiapan untuk pelaksanaan pendidikan inklusif yang efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Rivai dan Murni (2010: 103) perencanaan pendidikan memiliki maksud untuk mempersiapkan semua komponen pendidikan, agar dapat terlaksana proses belajar mengajar yang optimal dalam pelaksanaan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa perencanaan dengan melalui perumusan tujuan sekolah yang melibatkan semua stakeholder sekolah, sumber alat bantu pembelajaran, sumber dana, sumber tenaga, serta penyusunan rancangan pembelajaran merupakan langkah perencanaan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif guna mencapai tujuan pendidikan yang mampu menyetarakan siswa berkebutuhan khusus dengan siswa regular. Melalui perencanaan maka persiapan pelaksanaan pendidikan inklusif yang semakin baik, menunjang layanan peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan perencanaan juga maka tujuan dalam terlaksananya suatu kegiatan akan jelas dan lebih mudah untuk tercapai.

Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indoonesia (2009: 93) juga mengungkapkan bahwa merencanakan pada dasarnya ialah membuat keputusan tentang arah yang akan dituju, tindakan yang akan diambil, sumber daya yang akan diolah, dan teknik/metode yang dipilih untuk dipergunakan. Sederhananya, merencanakan merupakan proses perumusan tujuan-tujuan, sumber daya, dan teknik/metode yang terpilih. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh bahwa perencanaan pendidikan inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto mencakup perencanaan tujuan dan sumber-sumber segala hal yang dapat

menunjang tercapainya tujuan pendidikan inklusif yang diinginkan.

Dalam perencanaan terdapat perumusan tujuan, Kustawan (2016: 58) mengemukakan bahwa perumusan tujuan mencakup beberapa indikator, yakni jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Sehingga Perencanaan disusun sekolah bersama komite sekolah, dan staf lainnya dalam bentuk Rencana Kerja Sekolah Jangka Panjang (RKASJP) 8 tahun, Rencana Kerja Sekolah Jangka Menengah (RKASJM) 4 tahun, Rencana Kerja Sekolah Jangka Pendek/Tahunan (RKASJP/T), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Selaras dengan perencanaan tujuan di Mentikan 1 Mojokerto meliputi visi dan misi sekolah, rencana jangka panjang, menengah dan pendek, serta kurikulum.

Perencanaan sumber yang termasuk sumber dana atau juga rencana kegiatan anggaran sekolah, sumber tenaga pendidik kependidikan, serta sumber sarana dan prasarana. Hal ini sesuai dengan perencanaan yang dilakukan di SDN Mentikan 1 Mojokerto.

Kemudian teknik yang dipilih yakni mencakup meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, penyusunan RPP dan PPI. Hal tersebut sesuai dengan yang dilakukan di SDN Mentikan 1 Mojokerto dengan melakukan beberapa kegiatan guna meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, serta juga menyusun RPP. Namun terdapat ketidaksesuaian dengan tidak disusunnya PPI, dikarenakan terbatasnya tenaga pendidik khusus.

Fungsi pengorganisasian (*organizing*) dalam pelaksanaan manajemen pendidikan inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto yakni membentuk wadah untuk menghimpun potensi sumber yang menunjang dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Sesuai dengan pernyataan Rivai dan Murni (2010: 103) pengorganisasian pendidikan ditujukan menghimpun semua potensi komponen pendidikan dalam suatu organisasi yang sinergis agar dapat melaksanakan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pengorganisasian pendidikan inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto mencakup membuat kegiatan mengatur dan memadukan sumber dengan sedemikian rupa guna dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Sehingga melalui pengorganisasian dapat terkoordinasi dengan baik, serta memperjelas sistem yang digunakan di sekolah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil dengan pengorganisasian yakni adanya struktur organisasi.

Mengorganisasikan dapat diartikan sebagai: (1) menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan agar tercapainya tujuan organisasi, (2) merancang dan mengembangkan kelompok kerja, (3) menugaskan

seseorang / kelompok orang dalam suatu tanggung jawab dan fungsi tertentu, (4) mendelegasikan wewenang pada individu yang berhubungan dengan keleluasaan melaksanakan tugas. (Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2009: 94).

Hal ini sesuai dengan pengorganisasian di SDN Mentikan 1 Mojokerto penentuan sumber daya dan kegiatan, dengan pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, yang juga termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Juga pembagian tugas dan peran guru serta staf lainnya. Termasuk juga dalam mendelegasikan guru dan siswa dalam kegiatan-kegiatan yang menunjang kompetensi. Serta tentu dengan tersedianya struktur organisasi sekolah.

Fungsi pelaksanaan (*actuating*) dalam pelaksanaan manajemen pendidikan inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto merupakan upaya realisasi dari perencanaan dan pengorganisasian, yakni dengan menggerakkan semua sumber dan tenaga yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Kurniadin dan Machali (2016: 131) bahwa penggerakan atau pelaksanaan adalah upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja serta memanfaatkan fasilitas, atau untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama. Kemudian dapat juga diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian motif bekerja pada para tenaga kerja sehingga mereka bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto dengan menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah disusun, sehingga rencana-rencana yang telah disusun dapat direalisasikan. Melalui fungsi pelaksanaan upaya realisasi dari perencanaan-perencanaan dan pengorganisasian yang telah disusun dilaksanakan. Dengan kerjasama antar warga sekolah bersama-sama guna tercapainya tujuan pendidikan inklusif yang ditetapkan.

Melalui fungsi pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan inklusif terlaksana dengan sesuai rancangan yang telah disusun, serta dengan kepeemimpinan yang baik, pemberian motivasi pada warga sekolah, menjalin komunikasi, serta pengoptimalan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sehingga dengan semangat warga sekolah bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan inklusif yang diinginkan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Kurniadin dan Machali (2016: 288) bahwa fungsi penggerakan atau pelaksanaan dalam manajemen mencakup dalam kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan bentuk-bentuk lain dalam rangka memengaruhi

seseorang untuk melakukan sesuatu agar dapat tercapainya tujuan organisasi. Kepemimpinan berguna sebagai pemberi arahan, komando, dan pemberi serta pengambil keputusan organisasi. Motivasi berfungsi cara agar menggerakkan agar dapat mencapai tujuan. Komunikasi berguna sebagai alat untuk menjalin hubungan dalam rangka fungsi penggerakan dalam organisasi.

Fungsi pengawasan (*controlling*) dalam pelaksanaan manajemen pendidikan inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto adalah kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pendidikan dapat terlaksana dengan baik serta sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Amtu (2011: 56) bahwa pengawasan adalah hasil dari pelaksanaan perencanaan yang biasanya dijalankan dengan membandingkan antara perencanaan dengan pelaksanaan sesungguhnya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengawasan termasuk suatu upaya dalam mengontrol kinerja anggota organisasi. Pengawasan di SDN Mentikan 1 Mojokerto terdapat pengawasan kinerja dan pengawasan pelaksanaan pendidikan, sehingga dalam pelaksanaan dapat terkontrol sesuai dengan yang direncanakan dan terorganisir dengan baik. melalui pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat terjaga sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, serta sesuai dengan prosedur yang digunakan sekolah. Dalam pengawasan juga terdapat pelaporan yang diserahkan kepada pihak yang mengawasi.

Proses pengawasan/pengendalian melibatkan beberapa aspek, yakni (1) menetapkan standar kerja, (2) mengukur kinerja, (3) membandingkan unjuk kerja dengan standar yang telah ditetapkan, (4) mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan. (Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2009: 95). Hal tersebut sesuai dengan pengawasan yang dilakukan di SDN Mentikan 1 Mojokerto bahwa terdapat pengawasan kinerja warga sekolah yang melalui supervisi, kemudian adanya pengawasan dari pemerintah, kemudian mengukur kerja dengan adanya melaporkan pelaksanaan kegiatan sekolah secara berkala, serta evaluasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka hasil kriteria yang telah didapatkan ialah:

Tabel 4.1
Hasil Penilaian Fungsi Manajemen Pendidikan Inklusif

No	Aspek yang dinilai	Alternatif Hasil Nilai			
		Sangat baik	Baik	Kurang baik	Tidak baik
1.	Perencanaan (<i>planning</i>)		✓		
2.	Pengorganisasian (<i>organizing</i>)	✓			
3.	Pelaksanaan (<i>actuating</i>)		✓		
4.	Pengawasan (<i>controlling</i>)		✓		

Adapun keterangannya sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*) terdapat tidak terpenuhinya satu kriteria, yakni tidak menyusun PPI. Sehingga pada aspek perencanaan dikatakan baik.
2. Pengorganisasian (*organizing*) telah memenuhi kriteria, maka dikatakan sangat baik.
3. Pelaksanaan (*actuating*) terdapat tidak terpenuhinya satu kriteria, yakni tidak melaksanakan PPI. Sehingga pada aspek pelaksanaan dikatakan baik.
4. Pengawasan (*controlling*) terdapat tidak terpenuhinya satu kriteria, yakni kurangnya pengawasan dari pemerintah. Sehingga pada aspek pengawasan dikatakan baik.

Kemudian diambil salah satu substansi manajemen pendidikan dari Badan Standar Nasional Pendidikan yakni standar proses, yang juga mempunyai kriteria penilaian yang diadopsi dari instrumen akreditasi sekolah dasar oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah tahun 2017:

1. Sekolah membuat komponen: (1) identitas mata pelajaran/tema, (2) identitas sekolah, (3) kompetensi inti, (4) kompetensi dasar, (5) materi pokok, (6) kegiatan pembelajaran, (7) penilaian, (8) alokasi waktu, (9) sumber belajar.
 - A. Memuat 9 komponen dalam silabus
 - B. Memuat 8 komponen dalam silabus
 - C. Memuat 7 komponen dalam silabus
 - D. Memuat 6 komponen dalam silabus
 - E. Memuat kurang dari 6 komponen dalam silabus
2. Sekolah mengembangkan RPP dari silabus, secara lengkap dan sistematis.
 - A. 100% mata pelajaran/tema
 - B. 95%-99% mata pelajaran/tema
 - C. 90%-94% mata pelajaran/tema
 - D. 85%-89% mata pelajaran/tema
 - E. Kurang dari 85% mata pelajaran/tema
3. Sekolah mengalokasikan waktu dan beban belajar sesuai ketentuan: (1) durasi 1 jam pelajaran, (2)

- beban belajar per minggu, (3) beban belajar per semester, (4) beban belajar pertahun pelajaran.
- A. Sesuai 4 ketentuan
 B. Sesuai 3 ketentuan
 C. Sesuai 2 ketentuan
 D. Sesuai 1 ketentuan
 E. Tidak ada yang sesuai ketentuan
4. Sekolah melaksanakan proses pembelajaran dengan jumlah siswa per rombongan belajar maksimum 28 orang.
- A. Jumlah siswa per rombongan belajar maksimum 28 orang.
 B. Jumlah siswa per rombongan belajar sebanyak 29-30 orang.
 C. Jumlah siswa per rombongan belajar sebanyak 31-32 orang.
 D. Jumlah siswa per rombongan belajar sebanyak 33-34 orang.
 E. Jumlah siswa per rombongan belajar lebih dari 34 orang.
5. Siswa menggunakan buku teks pelajaran dalam proses pembelajaran.
- A. 100% menggunakan buku teks.
 B. 95%-99% menggunakan buku teks.
 C. 90%-94% menggunakan buku teks.
 D. 85%-89% menggunakan buku teks.
 E. Kurang dari 85% menggunakan buku teks.
6. Guru melakukan pengelolaan kelas yang baik dengan: (1) keteladanan dalam sikap spiritual, (2) keteladanan dalam sikap sosial, (3) pengaturan tempat, (4) pengaturan suara, (5) penggunaan kata-kata santun, lugas, dan mudah dimengerti, (6) kemampuan belajar siswa, (7) ketertiban kelas, (8) penguatan dan umpan balik, (9) keaktifan siswa, (10) berpakaian sopan, bersih, dan rapi, (11) menjelaskan silabus mata pelajaran pada tiap awal semester, (12) ketepatan penggunaan waktu.
- A. Melakukan 12 kriteria
 B. Melakukan 10-11 kriteria
 C. Melakukan 8-9 kriteria
 D. Melakukan 6-7 kriteria
 E. Melakukan kurang dari 6 kriteria
7. Guru memulai pembelajaran dengan 5 langkah pendahuluan berikut: (1) menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti pembelajaran, (2) memberi motivasi belajar siswa, (3) mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, (4) menjelaskan tujuan pembelajaran, (5) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
- A. 91%-100% guru melakukan 5 langkah pendahuluan
 B. 81%-90% guru melakukan 5 langkah pendahuluan
 C. 71%-80% guru melakukan 5 langkah pendahuluan
 D. 61%-70% guru melakukan 5 langkah pendahuluan
 E. Kurang dari 61% guru melakukan 5 langkah pendahuluan
8. Guru menggunakan **model** pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran/tema.
- A. 91%-100% guru menggunakan model yang sesuai
 B. 81%-90% guru menggunakan model yang sesuai
 C. 71%-80% guru menggunakan model yang sesuai
 D. 61%-70% guru menggunakan model yang sesuai
 E. Kurang dari 61% guru menggunakan model yang sesuai
9. Guru menggunakan **metode** pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa dan mata pelajaran/tema.
- A. 91%-100% guru menggunakan metode yang sesuai
 B. 81%-90% guru menggunakan metode yang sesuai
 C. 71%-80% guru menggunakan metode yang sesuai
 D. 61%-70% guru menggunakan metode yang sesuai
 E. Kurang dari 61% guru menggunakan metode yang sesuai
10. Guru menggunakan **media** pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa dan mata pelajaran/tema.
- A. 91%-100% guru menggunakan media yang sesuai
 B. 81%-90% guru menggunakan media yang sesuai
 C. 71%-80% guru menggunakan media yang sesuai
 D. 61%-70% guru menggunakan media yang sesuai
 E. Kurang dari 61% guru menggunakan media yang sesuai
11. Guru menggunakan **sumber belajar** yang sesuai karakteristik siswa dan mata pelajaran/tema.
- A. 91%-100% guru menggunakan sumber belajar yang sesuai
 B. 81%-90% guru menggunakan sumber belajar yang sesuai
 C. 71%-80% guru menggunakan sumber belajar yang sesuai
 D. 61%-70% guru menggunakan sumber belajar yang sesuai
 E. Kurang dari 61% guru menggunakan sumber belajar yang sesuai
12. Guru menggunakan **pendekatan** pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa dan mata pelajaran/tema.
- A. 91%-100% guru menggunakan pendekatan yang sesuai
 B. 81%-90% guru menggunakan pendekatan yang sesuai
 C. 71%-80% guru menggunakan pendekatan yang sesuai

- D. 61%-70% guru menggunakan pendekatan yang sesuai
- E. Kurang dari 61% guru menggunakan pendekatan yang sesuai
13. Guru bersama siswa mengakhiri pembelajaran dengan langkah penutup, meliputi: (1) mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran, (2) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, (3) melakukan kegiatan tindak lanjut, dan (4) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran berikutnya.
- A. 91%-100% guru melakukan 4 langkah penutup
- B. 81%-90% guru melakukan 4 langkah penutup
- C. 71%-80% guru melakukan 4 langkah penutup
- D. 61%-70% guru melakukan 4 langkah penutup
- E. Kurang dari 61% guru melakukan 4 langkah penutup
14. Guru menggunakan pendekatan penilaian otentik dalam penilaian proses pembelajaran.
- A. 91%-100% guru menggunakan pendekatan penilaian otentik
- B. 81%-90% guru menggunakan pendekatan penilaian otentik
- C. 71%-80% guru menggunakan pendekatan penilaian otentik
- D. 61%-70% guru menggunakan pendekatan penilaian otentik
- E. Kurang dari 61% guru menggunakan pendekatan penilaian otentik
15. Guru memanfaatkan hasil penilaian otentik untuk merencanakan program: (1) remedial, (2) pengayaan, (3) pelayanan konseling, (4) perbaikan proses pembelajaran.
- A. 91%-100% guru memanfaatkan untuk 4 kegiatan
- B. 81%-90% guru memanfaatkan untuk 4 kegiatan
- C. 71%-80% guru memanfaatkan untuk 4 kegiatan
- D. 61%-70% guru memanfaatkan untuk 4 kegiatan
- E. Kurang dari 61% guru memanfaatkan untuk 4 kegiatan
16. Kepala sekolah melakukan pengawasan proses pembelajaran dengan objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- A. Dilakukan secara objektif dan transparan, dan digunakan untuk peningkatan mutu
- B. Dilakukan secara objektif dan transparan, tetapi tidak digunakan untuk peningkatan mutu
- C. Dilakukan secara objektif dan tertutup, dan tidak digunakan untuk peningkatan mutu
- D. Dilakukan secara subjektif dan tertutup, dan tidak digunakan untuk peningkatan mutu
- E. Tidak melakukan pengawasan
17. Kepala sekolah melakukan supervisi proses pembelajaran terhadap seluruh guru setiap tahun.
- A. Menyupervisi 91%-100% guru
- B. Menyupervisi 81%-90% guru
- C. Menyupervisi 71%-80% guru
- D. Menyupervisi 61%-70% guru
- E. Menyupervisi kurang dari 61% guru
18. Kepala sekolah memantau proses pembelajaran melalui: (1) diskusi kelompok terfokus, (2) pengamatan, (3) pencatatan, (4) perekaman, (5) wawancara, (6) pendokumentasian.
- A. Melalui 5 atau lebih cara pemantauan
- B. Melalui 4 cara pemantauan
- C. Melalui 3 cara pemantauan
- D. Melalui 2 cara pemantauan
- E. Kurang dari 2 cara pemantauan
19. Kepala sekolah menindaklanjuti hasil supervisi proses pembelajaran dengan cara: (1) pemberian contoh, (2) diskusi, (3) konsultasi, (4) pelatihan.
- A. Menindaklanjuti dengan 4 cara
- B. Menindaklanjuti dengan 3 cara
- C. Menindaklanjuti dengan 2 cara
- D. Menindaklanjuti dengan 1 cara
- E. Tidak menindaklanjuti
20. Kepala sekolah menyusun: (1) laporan pemantauan, (2) laporan supervisi, (3) laporan evaluasi proses pembelajaran, (4) program tindak lanjut.
- A. Menyusun laporan 3 kegiatan dan program tindak lanjut
- B. Menyusun laporan 3 kegiatan dan tidak merencanakan program tindak lanjut
- C. Menyusun laporan 2 kegiatan
- D. Menyusun laporan 1 kegiatan.
- E. Tidak menyusun laporan kegiatan
21. Kepala sekolah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran, minimal 1 tahun terakhir.
- A. Menindaklanjuti 91%-100% hasil pengawasan
- B. Menindaklanjuti 81%-90% hasil pengawasan
- C. Menindaklanjuti 71%-80% hasil pengawasan
- D. Menindaklanjuti 61%-70% hasil pengawasan
- E. Menindaklanjuti kurang dari 61% hasil pengawasan

Mengkonversikan setiap opsi jawaban A, B, C, D, atau E kedalam skor butir di mana butir. Butir pernyataan instrument yang dijawab A memperoleh skor butir 4 (A=4), B=3, C=2, D=1, dan E=0. Serta bobot butir telah ditentukan sebagai berikut.

Tabel 4.2

Hasil Penilaian Fungsi Manajemen Pendidikan Inklusif pada Standar Proses

No. Butir	Jawaban	Skor butir penilaian	Bobot butir	Skor tertimbang perolehan
1	A	4	3	12
2	B	3	4	12

No. Butir	Jawaban	Skor butir penilaian	Bobot butir	Skor tertimbang perolehan
3	A	4	3	12
4	C	2	3	6
5	A	4	3	12
6	A	4	3	12
7	B	3	3	9
8	B	3	3	9
9	A	4	4	16
10	A	4	3	12
11	A	4	3	12
12	B	3	3	9
13	B	3	3	9
14	B	3	3	9
15	C	2	4	8
16	A	4	3	12
17	A	4	4	16
18	B	3	3	9
19	A	4	3	12
20	A	4	3	12
21	A	4	3	12
jumlah			67	232

$$\text{Skor Tertimbang Perolehan} = \text{Skor Butir Perolehan} \times \text{Bobot Butir}$$

Jumlah skor tertimbang maksimum untuk standar proses = 268

Bobot komponen untuk standar proses adalah 14

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi} = \frac{\text{Jumlah Skor Tertimbang Perolehan}}{\text{Jumlah Skor Tertimbang Maksimum}} \times \text{Bobot Komponen}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Komponen Akreditasi} &= \frac{232}{268} \times 14 \\ &= 12,119 \end{aligned}$$

Pembulatan Nilai Komponen Kreditasi dituliskan 2 digit di belakang koma, sehingga:

Nilai Komponen Kreditasi = 12, 12

Nilai Komponen Kreditasi Skala Ratusan:

$$\text{Nilai Komponen Akreditasi Skala Ratusan} = \frac{\text{Nilai Komponen Akreditasi}}{\text{Bobot Komponen}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Komponen Akreditasi Skala Ratusan} &= \frac{12,12}{14} \times 100 \\ &= 86,57 \\ &= 87 \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

Pemeringkatan akreditasi dilakukan jika hasil akreditasi memenuhi kriteria status akreditasi. Sekolah memperoleh peringkat akreditasi sebagai berikut:

1. Peringkat akreditasi A (Unggul) jika sekolah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 91 sampai dengan 100 ($91 < NA < 100$).

2. Peringkat akreditasi B (Baik) jika sekolah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 81 sampai dengan 90 ($81 < NA < 90$).
3. Peringkat akreditasi C (Cukup) jika sekolah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 71 sampai dengan 80 ($71 < NA < 80$).

Sekolah yang tidak terakreditasi adalah yang mendapat nilai akhir:

1. 61 sampai dengan 70 ($61 < NA < 70$) dengan peringkat akreditasi D (Kurang).
2. 0 sampai dengan 60 ($0 < NA < 60$) dengan peringkat akreditasi E (Sangat Kurang).

Adapun nilai peringkat standar proses pada SDN Mentikan 1 Mojokerto adalah 87, sehingga masuk pada peringkat B (Baik).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi Perencanaan (*planning*) dalam Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto meliputi perencanaan visi, misi dan tujuan sekolah yang inklusif, serta rencana sekolah jangka panjang, menengah, dan tahunan/pendek. Kemudian sumber daya dana, kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013 yang telah dimodifikasi, sumber tenaga pendidik dan kependidikan, serta sumber sarana dan prasarana. Maka fungsi perencanaan dikatakan baik, karena tidak memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan yakni menyusun PPI. Serta pada standar proses meliputi perencanaan silabus sesuai kriteria di dalamnya, perencanaan RPP sesuai dengan ketentuan silabus Kemudian kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013 yang telah dimodifikasi.
2. Fungsi Pengorganisasian (*organizing*) dalam Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto mencakup penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan dengan membentuk panitia penerimaan peserta didik baru yang termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, adanya struktur organisasi sekolah, pembagian tugas sesuai struktur organisasi sekolah, serta mendelegasikan guru dan siswa mengikuti kegiatan di luar sekolah. Maka fungsi pengorganisasian dikatakan sangat baik, karena telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. Serta pada standar proses mencakup mengelola kelas dan penempatan peserta didik sesuai karakteristik.
3. Fungsi Pelaksanaan (*actuating*) dalam Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto mencakup melaksanakan pembelajaran sesuai RPP yang telah disusun, pengarahan warga sekolah agar melaksanakan tugas sesuai kualifikasi, pemberian komando pada warga sekolah, serta pemberian semangat dan motivasi agar

senantiasa semangat bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Maka fungsi pelaksanaan dikatakan baik, karena tidak memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan yakni tidak melaksanakan PPI. Serta pada standar proses mencakup melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun, memulai pembelajaran dengan langkah-langkah yang ditetapkan, menggunakan model, metode, media, sumber belajar, serta pendekatan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mengakhiri pembelajaran dengan langkah penutup sesuai ketentuan.

4. Fungsi Pengawasan (*controlling*) dalam Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Inklusif di SDN Mentikan 1 Mojokerto mencakup adanya pengawasan kinerja, serta adanya pengawasan dari dinas pendidikan namun hanya sekadarnya saja, serta pelaksanaan evaluasi berkala. Maka fungsi pengawasan dikatakan baik, karena tidak memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan yakni kurangnya pengawasan dari pemerintah. Serta pada standar proses mencakup adanya pengawasan kinerja, serta adanya pengawasan dari dinas pendidikan namun hanya sekadarnya saja, serta pelaksanaan evaluasi berkala.

Sehingga berdasarkan kesimpulan tersebut, kriteria standar proses yang diperoleh SDN Mentikan 1 Mojokerto ialah baik. Secara keseluruhan, fungsi manajemen pendidikan di SDN Mentikan 1 Mojokerto ialah baik. Kemudian terdapat pula kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ialah sarana prasarana pendukung pembelajaran yang masih kurang, ruang kelas sumber yang terlalu sempit sebagai ruang belajar para peserta didik berkebutuhan khusus yang begitu banyak, dan terbatasnya tenaga pendidik untuk siswa berkebutuhan khusus.

Saran

1. Bagi kepala sekolah: mengajukan kepada dinas pendidikan untuk penambahan tenaga pendidik khususnya guru pendamping khusus (GPK) karena masih kekurangan GPK, serta mengajukan penambahan sarana prasarana penunjang belajar peserta didik berkebutuhan khusus.
2. Bagi guru: mempertahankan kerjasama antara GPK dalam mengelola kelas, menyamakan hak antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus.
3. Dinas pemerintah Kota Mojokerto: harus ada pengawasan yang lebih mendetail dari dinas terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di setiap sekolah di Kota Mojokerto. Karena di SDN Mentikan 1 Mojokerto jumlah peserta didik berkebutuhan khusus dan tenaga guru berbeda jauh.

Serta harus ada peninjauan terhadap sarana dan prasarana terkait dengan kelancaran penyelenggaraan pendidikan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Ina. 2016. *Manajemen Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri Sumber Sari 1 Kota Malang*. Tuban: PPs Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.
- Amtu, Onisimus. 2011. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013a. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2013b. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bansm. *Perangkat Akreditasi SD-MI 2017 – bansm* (pdf). (<https://bansm.kemendikbud.go.id>get>, diakses 9 Mei 2018)
- BSNP. *Standar Nasional Pendidikan*. (online) (<http://bsnp-indonesia.org/standar-nasional-pendidikan>, diakses 27 April 2018)
- Garnida, Dadang. 2015. *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung: Refika Aditama.
- Hariri, Hasan, dkk. 2016. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kurniadin, Didin dan Machali, Imam. 2016. *Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kustawan, Dedy. 2016. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta Timur: Luxima.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michsel, Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudjito, dkk. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Badouse Media Jakarta.
- Mulyasa, E. 2014. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 2008. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bum Aksara.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Ni'matuzahroh dan Nurhamida, Yuni. 2016. *Individu Berkebutuhan Khusus dan Pendidikan Inklusif*. Malang: UMM Press.
- Rivai, Veithzal dan Murni, Sylviana. 2010. *Education Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rohiat. 2009. *Manajemen Sekolah – Teori Dasar dan Praktik*. Bandung: PTR Refika Aditama.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tarmansyah. 2009. *Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SD Negeri 03 Alai Padang Utara Kota Padang*. Padang: PPs Universitas Negeri Padang.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Wati, Ery. 2014. *Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: PPs Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Lampiran Undang-Undang

Salinan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan ayat 2.

Salinan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Salinan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat 1.

Salinan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 51.

Salinan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Salinan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun Pelajaran 2013/2014 dalam pasal 4 ayat (9) tentang Sekolah Penyelenggara Inklusif.

